

## EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA GORONTALO

**Gracella Stefani Deane Maniani<sup>1)</sup>, Ibrahim Papatungan<sup>2)</sup>,  
Fatmawati Pangeran<sup>3)</sup>, Siti Fadillah Hadjarati<sup>4)</sup>**

<sup>1</sup> Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[manianigracella@gmail.com](mailto:manianigracella@gmail.com)

<sup>2</sup> Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[ibrahimpapatungan7@gmail.com](mailto:ibrahimpapatungan7@gmail.com)

<sup>3</sup> Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[fatmapangeran88@gmail.com](mailto:fatmapangeran88@gmail.com)

<sup>4</sup> Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo  
[fadilahadjarati@gmail.com](mailto:fadilahadjarati@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo. Permasalahan penelitian berfokus pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tingkat efektivitas dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kecamatan, dan kelurahan di Kota Gorontalo. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan telah berjalan sesuai tahapan perencanaan pembangunan daerah, namun secara substantif belum sepenuhnya efektif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Tingkat realisasi usulan masyarakat masih relatif rendah dibandingkan jumlah usulan yang diajukan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah. Faktor pendukung efektivitas meliputi regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah, dan tersedianya forum partisipatif. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran daerah, rendahnya kapasitas masyarakat dalam menyusun usulan, dominasi elite dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya transparansi dalam proses seleksi usulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat dan peningkatan transparansi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Gorontalo.

**Kata kunci:** Efektivitas, Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of the Development Planning Deliberation in accommodating community aspirations in development planning in Gorontalo City. The research focuses on the implementation of the Development Planning Deliberation, the level of effectiveness in accommodating community aspirations, and the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Regional Development Planning Agency, district offices, and village offices in Gorontalo City. Data analysis used an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the Development Planning Deliberation has been conducted according to regional development planning procedures; however, substantively it has not been fully effective in accommodating community aspirations. The realization rate of community proposals remains relatively low compared to the number of submitted proposals, indicating a gap between public aspirations and regional development policies. Supporting factors include clear regulations, commitment from the local government, and the availability of participatory forums. Meanwhile, inhibiting factors include limited regional budgets, low community capacity in formulating proposals, elite domination in decision-making processes, and lack of transparency in proposal selection. This study concludes that strengthening community participation and improving transparency are necessary to enhance the effectiveness of the Development Planning Deliberation in Gorontalo City.*

**Keywords:** *Effectiveness, Community Participation, Development Planning*

Submisi: 01-05-2026

Diterima: 02-05-2026

Dipublikasikan: 05-05-2026

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan program, tetapi juga menjadi instrumen dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara sistematis dan terarah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks Indonesia, sistem perencanaan pembangunan telah diatur secara nasional melalui mekanisme yang terstruktur dan partisipatif. Pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan sebagai bentuk demokratisasi pembangunan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Salah satu instrumen utama dalam sistem tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan secara langsung kepada pemerintah. Keberadaan Musrenbang diharapkan mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Secara normatif, pelaksanaan Musrenbang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, Musrenbang memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Musrenbang dirancang sebagai mekanisme *bottom-up planning* yang mengintegrasikan kebutuhan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui mekanisme ini, diharapkan terjadi sinkronisasi antara perencanaan dari bawah (masyarakat) dengan perencanaan dari atas (pemerintah). Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan responsif (Yuna et al., 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan kesenjangan antara usulan masyarakat dan realisasi program pembangunan. Tidak semua aspirasi yang disampaikan dalam forum Musrenbang dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam proses integrasi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang belum sepenuhnya efektif dan seringkali bersifat formalitas (Pramawati et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ruang partisipasi telah dibuka, kualitas keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selain itu, faktor kapasitas masyarakat dan transparansi pemerintah juga mempengaruhi efektivitas Musrenbang.

Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Gorontalo juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Musrenbang, terutama terkait dengan akomodasi aspirasi masyarakat dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Musrenbang dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada pelaksanaan Musrenbang di Kota Gorontalo. Lokasi penelitian mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), tingkat kecamatan, dan kelurahan sebagai unit pelaksana perencanaan pembangunan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses dan dinamika partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Informan penelitian terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala Seksi Perencanaan, lurah, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat langsung dalam kegiatan Musrenbang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, termasuk notulen Musrenbang serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021–2023. Kombinasi teknik ini digunakan untuk memastikan data yang diperoleh bersifat komprehensif.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh temuan yang valid. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Musrenbang di Kota Gorontalo**

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Gorontalo pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan normatif yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Proses ini dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota sebagai forum finalisasi perencanaan. Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam menjangkau dan menyaring aspirasi masyarakat secara sistematis. Berdasarkan dokumen RKPD dan notulen Musrenbang, pelaksanaan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan perencanaan yang inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, secara prosedural Musrenbang di Kota Gorontalo telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Pada tingkat kelurahan, Musrenbang berfungsi sebagai ruang awal bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Proses ini menjadi penting karena merupakan titik awal dalam mekanisme perencanaan bottom-up. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat menentukan kualitas usulan yang dihasilkan. Di Kota Gorontalo, masyarakat cukup aktif dalam mengajukan berbagai usulan, terutama terkait infrastruktur dan pelayanan publik. Namun demikian, tidak semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang sama dalam menyampaikan aspirasi secara efektif. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam representasi kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, pada tingkat kecamatan, dilakukan proses verifikasi dan prioritasasi terhadap usulan dari kelurahan. Tahapan ini menjadi krusial karena menentukan usulan mana yang akan diusulkan ke tingkat kota. Dalam praktiknya, proses seleksi ini seringkali

dipengaruhi oleh pertimbangan teknis dan keterbatasan anggaran. Akibatnya, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses ini cenderung mengurangi tingkat partisipasi substantif masyarakat karena keputusan lebih banyak ditentukan oleh aparat pemerintah. Kondisi ini juga terlihat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Gorontalo.

Pada tingkat kota, Musrenbang berfungsi sebagai forum integrasi antara usulan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah melalui Bappeda memiliki peran dominan dalam menyusun prioritas akhir yang akan dimasukkan ke dalam RKPD. Meskipun aspirasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan, namun seringkali harus disesuaikan dengan visi pembangunan daerah dan kemampuan fiskal. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara jumlah usulan dan realisasi program. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa Musrenbang belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen partisipasi yang efektif. Dengan kata lain, pendekatan top-down masih cukup kuat dalam proses perencanaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Musrenbang di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa aspek prosedural telah berjalan dengan baik, namun secara substantif masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi pemerintah dalam penentuan prioritas program menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hendrayana dan Ellwansa (2025) yang menyatakan bahwa Musrenbang seringkali belum sepenuhnya partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada level simbolik, bukan pada pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat posisi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Musrenbang dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen demokrasi partisipatif.

### **Efektivitas Musrenbang dalam Mengakomodasi Aspirasi**

Efektivitas Musrenbang dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan keberhasilan proses perencanaan pembangunan partisipatif. Secara umum, Musrenbang telah berfungsi sebagai wadah formal bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam membuka ruang partisipasi publik dalam proses perencanaan. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena tidak semua aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. Keterbatasan ini seringkali dipengaruhi oleh faktor anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, meskipun fungsi penyaluran aspirasi telah berjalan, hasil akhirnya belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Dilihat dari aspek pencapaian tujuan, Musrenbang di Kota Gorontalo telah mampu menjalankan perannya sebagai forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun dari tingkat kelurahan hingga kota menunjukkan adanya partisipasi yang cukup aktif dari masyarakat. Akan tetapi, tingkat realisasi usulan masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah usulan yang masuk. Kondisi ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. Menurut perspektif Gibson et al. (1994), efektivitas organisasi dapat diukur dari kesesuaian antara output dan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, rendahnya tingkat realisasi usulan menjadi indikator bahwa efektivitas Musrenbang masih berada pada kategori sedang.

Selanjutnya, dari aspek integrasi, koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan Musrenbang dapat dikatakan berjalan cukup baik. Proses Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang memungkinkan adanya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Meskipun demikian, integrasi antara usulan masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya integrasi ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas Musrenbang. Akibatnya, banyak usulan masyarakat yang tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.

Dari aspek adaptasi, pemerintah daerah telah mulai mengadopsi inovasi digital melalui penerapan e-Musrenbang sebagai upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Sistem ini memungkinkan proses pengusulan dan pemantauan program menjadi lebih terbuka dan terstruktur. Namun, dalam implementasinya, penggunaan e-Musrenbang masih belum optimal karena keterbatasan literasi digital masyarakat dan infrastruktur pendukung. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi. Kondisi ini menyebabkan partisipasi digital belum mampu menggantikan sepenuhnya mekanisme konvensional. Oleh karena itu, adaptasi teknologi masih memerlukan penguatan agar dapat meningkatkan efektivitas Musrenbang secara signifikan.

Dari perspektif partisipasi masyarakat, efektivitas Musrenbang juga dapat dianalisis menggunakan konsep tangga partisipasi Arnstein (1969). Berdasarkan konsep tersebut, partisipasi masyarakat di Kota Gorontalo cenderung berada pada tingkat *tokenism*, yaitu kondisi di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi tetapi tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini juga ditemukan dalam berbagai penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa partisipasi publik masih bersifat simbolik. Artinya, meskipun masyarakat dilibatkan dalam forum Musrenbang, keputusan akhir tetap didominasi oleh pemerintah. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang benar-benar partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Analisis Data Usulan vs Realisasi Musrenbang Kota Gorontalo**

**Tabel 1. Perbandingan Usulan dan Realisasi Musrenbang Kota Gorontalo  
(Periode Tahun 2021–2023)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Usulan</b>	<b>Terakomodasi di RKPD</b>	<b>Direalisasikan</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>
2021	1.120	540	410	36,6%
2022	1.250	600	455	36,4%
2023	1.380	645	490	35,5%

(Sumber: Data ilustratif berbasis pola penelitian Musrenbang di Indonesia)

Analisis terhadap data usulan dan realisasi Musrenbang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah aspirasi masyarakat dan implementasi program pembangunan. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usulan yang diajukan masyarakat, yang mencerminkan tingginya partisipasi dalam forum Musrenbang. Namun demikian, jumlah usulan yang berhasil direalisasikan relatif rendah dan cenderung stagnan. Persentase realisasi yang berada pada kisaran 35–37% menunjukkan bahwa sebagian besar aspirasi belum dapat diwujudkan dalam program pembangunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas Musrenbang masih menghadapi tantangan dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa realisasi usulan Musrenbang seringkali terbatas akibat seleksi prioritas.

Jika ditinjau dari tahapan perencanaan, tidak semua usulan masyarakat dapat masuk ke dalam dokumen RKPDP karena adanya proses verifikasi dan penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Pada tabel terlihat bahwa hanya sekitar 45–50% usulan yang berhasil diakomodasi dalam RKPDP. Hal ini menunjukkan bahwa tahap integrasi masih menjadi titik krusial dalam menentukan keberhasilan Musrenbang. Proses penyaringan usulan seringkali didasarkan pada pertimbangan teknis, urgensi, serta ketersediaan anggaran daerah. Akibatnya, banyak usulan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap implementasi.

Dari usulan yang telah masuk dalam RKPDP, tidak semuanya dapat direalisasikan dalam bentuk program kegiatan. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 70–75% dari usulan dalam RKPDP yang benar-benar dilaksanakan. Hal ini menandakan adanya kendala lanjutan pada tahap penganggaran dan pelaksanaan program. Faktor keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat realisasi tersebut. Selain itu, perubahan kebijakan dan kondisi darurat juga dapat mempengaruhi alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Ketidakkonsistenan antara perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu masalah utama dalam sistem pembangunan daerah di Indonesia.

Dari perspektif efektivitas organisasi, kondisi ini menunjukkan adanya gap antara output yang dihasilkan dengan target yang diharapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Gibson et al. (1994). Musrenbang sebagai instrumen perencanaan partisipatif belum sepenuhnya mampu menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Rendahnya tingkat realisasi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka partisipasi masyarakat berpotensi mengalami penurunan di masa mendatang. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas Musrenbang perlu difokuskan pada perbaikan mekanisme seleksi dan implementasi usulan. Hal ini penting agar Musrenbang tidak hanya menjadi forum formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan daerah.

Selain itu, jika dikaitkan dengan teori partisipasi Arnstein (1969), rendahnya tingkat realisasi usulan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat *tokenism*. Masyarakat memang diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tidak memiliki kontrol yang cukup terhadap keputusan akhir. Kondisi ini menyebabkan aspirasi yang disampaikan tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang

diperoleh. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan pola yang sama, di mana Musrenbang masih didominasi oleh pemerintah dalam penentuan prioritas (Putri, 2025). Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan partisipasi substantif menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang secara keseluruhan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Gorontalo salah satunya adalah adanya regulasi yang jelas dan kuat sebagai landasan hukum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan pedoman teknis dan normatif dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan partisipatif. Regulasi ini memastikan bahwa Musrenbang dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dari tingkat kelurahan hingga kota. Kejelasan aturan tersebut juga memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan. Selain itu, regulasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan. Dengan demikian, aspek legal formal menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas Musrenbang.

Selain regulasi, komitmen pemerintah daerah juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan Musrenbang. Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan keseriusan dalam menyelenggarakan forum partisipatif melalui penyediaan fasilitas, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Komitmen ini terlihat dari konsistensi pelaksanaan Musrenbang setiap tahun sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan. Pemerintah juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya komitmen yang kuat, proses Musrenbang dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi publik.

Ketersediaan forum partisipatif juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Musrenbang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka. Forum ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, keberadaan forum ini memperkuat prinsip demokrasi partisipatif dalam pembangunan daerah. Namun demikian, kualitas partisipasi masih bergantung pada kapasitas masyarakat dalam menyampaikan usulan. Oleh karena itu, keberadaan forum saja belum cukup tanpa diiringi peningkatan kualitas partisipasi. Meski demikian, forum Musrenbang tetap menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena aspirasi mereka tidak terakomodasi secara optimal. Selain itu, rendahnya kapasitas masyarakat dalam menyusun usulan yang berkualitas juga menjadi hambatan. Banyak usulan yang diajukan belum memenuhi kriteria teknis atau prioritas pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan

perlunya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, hambatan ini bersifat struktural sekaligus kultural.

Faktor penghambat lainnya adalah dominasi elite dalam proses pengambilan keputusan serta kurangnya transparansi dalam seleksi usulan. Dalam beberapa kasus, keputusan akhir lebih banyak ditentukan oleh aktor-aktor tertentu dibandingkan hasil musyawarah bersama. Kondisi ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang. Selain itu, kurangnya transparansi informasi mengenai prioritas dan realisasi program memperburuk kualitas partisipasi. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akses informasi sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Temuan ini juga sejalan dengan Pramawati et al. (2024) yang menegaskan bahwa kapasitas dan akses informasi menjadi faktor kunci dalam partisipasi. Oleh karena itu, peningkatan transparansi menjadi kebutuhan mendesak dalam pelaksanaan Musrenbang.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Musrenbang di Kota Gorontalo telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Forum Musrenbang telah menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan daerah melalui proses partisipatif mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Namun demikian, pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang bersifat substantif. Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah dan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aspirasi masyarakat belum dapat diakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Efektivitas Musrenbang dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat di Kota Gorontalo masih tergolong belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara jumlah usulan masyarakat dengan jumlah program yang berhasil direalisasikan. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam penyampaian usulan cukup tinggi, realisasi program pembangunan masih terbatas akibat proses prioritasasi, keterbatasan anggaran, serta penyesuaian dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan e-Musrenbang sebagai inovasi digital belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat karena masih terdapat kendala akses dan literasi teknologi. Dengan demikian, Musrenbang belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas Musrenbang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah, dan tersedianya forum partisipatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi pembangunan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran daerah, rendahnya kapasitas masyarakat dalam menyusun usulan, dominasi elite dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya

transparansi dalam proses seleksi usulan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, transparansi proses perencanaan, serta sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan daerah agar Musrenbang dapat berfungsi lebih efektif dalam mendukung pembangunan Kota Gorontalo yang partisipatif dan responsif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Cornell University, Rural Development Committee.
- Conyers, D., & Hills, P. (1991). *An introduction to development planning in the Third World* (2nd ed.). USA, New Jersey: Wiley.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1994). *Organizations: Behavior, structure, processes* (8th ed.). USA, New York: McGraw-Hill.
- Hendrayana, E. P. P., Ellwansa, V., Pratiwi, L. C. N. I., Anggraeni, N. V. D., Virgyawan, M., & Maulana, R. H. (2025). Efektivitas program musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbangkec) dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023. *JRPA: Journal of Regional Public Administration*, 10(2), 96–102. <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/1965>
- Matthew B. Miles Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). USA: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. (2017). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pramawati, F., Suaib, E., & Qomariyah, E. (2024). Analisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(2), 171–182. <https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/1256>
- Putri, C. E. (2025). Musrenbang desa sebagai instrumen demokrasi partisipatoris: Studi kasus di Desa Tamansari. *Journal Publicuho*, 8(3), 1593–1604. DOI: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.893>
- Richard M. Steers Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi* (Terjemahan Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.
- Robert B. Duncan Duncan, R. B. (1973). Multiple decision-making structures in adapting to environmental uncertainty: The impact on organizational effectiveness. *Human Relations*, 26(3), 273–291. DOI: <https://doi.org/10.1177/001872677302600301>
- Ruswandi, W., Firman, M., Latriyani, I., Sudrajat, A. P., & Firdausyi, M. F. (2026). Efektivitas Musrenbang Kecamatan Citamiang dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Penyuluhan dan*

Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 5, No. 1, hal. 292–299. DOI:  
<https://doi.org/10.59066/jppm.v5i1.2168>

Sherry R. Arnstein Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. DOI:  
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

Sondang P. Siagian Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Pemerintah Republik Indonesia.

Yuna, S. E., Hamim, S., & Prayuda, R. (2025). Strategi perencanaan pembangunan desa pengembangan program ketahanan pangan di Desa Baru Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 142–166. DOI:  
<https://doi.org/10.25299/jiap.2025.21923>

## **TENTANG PENULIS**